PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, *E-FILING* DAN *E-FAKTUR* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA KOTA JAYAPURA

PROPOSAL PENELITIAN

Tujuan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas Akuntansi
Keperilakuan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis
Papua Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

SRI RAHAYU

18-121-033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
JAYAPURA**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kuasa rahmat serta ilmu yang senantiasa diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “*PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING, E-FILING DAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA KOTA JAYAPURA*”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keperilakuan yaitu Bapak Victor Pattiasina, SE., M.SA., Ak., ACPA., CA. Yang telah membimbing terkait materi dalam mata kuliah tersebut.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang. Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jayapura, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	10
A. TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Penelitian Terdahulu	10
2. Kajian Teori	25
A. Landasan Teori	25
Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	25
<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	25
Perpajakan	26
Fungsi Pajak	27
Sistem Pemungutan	28
Sistem E-billing.....	28
Penerapan E-filing	31
E-faktur	33
Kepatuhan Wajib Pajak	34
Pemahaman Internet	36
B. Kerangka Konseptual	37
C. Hipotesis	39
BAB III.....	41

METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	42
C. Variabel Penelitian	43
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Analisis Data	46
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN KUESIONER	54

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara, agar nantinya negara dapat menggerakkan roda perekonomian yang baik dan dapat menyejahterakan warga negaranya. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran (N. W. Sari, 2021).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok, dan merupakan hal yang paling diprioritaskan, karena dengan pajak kebutuhan untuk pembangunan negara dapat terbantu.

Pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak semakin meningkat dari masa kemasa seiring dengan perkembangan teknologi. Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya Indonesia. Pajak di Indonesia ditempatkan pada posisi teratas dalam meningkatkan kas negara. Hampir 75% penerimaan kas negara terbesar yaitu melalui sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai RAPBN 2018 yaitu sebesar Rp 1.878,4 triliun (RAPBN 2018) dimana penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun (<https://kemenkeu.go.id/>, 2018) Pasal 1 Ayat 1 (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007) menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pattiasina dkk., (2020) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban masyarakat untuk menghimpun dana pembangunan suatu negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan, bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan mencegah terjadinya penurunan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan *Self assessment system*. Astuti, (2015) mengemukakan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus di bayar. Ini berarti bahwa wajib pajak diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri pajak yang harus di bayar.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2018, penerimaan negara diestimasikan sejumlah Rp1.894,7 triliun. Estimasi dana yang akan diterima berasal dari pendapatan pajak sejumlah Rp1.618,1 (Seribu Enam Ratus Delapan Belas Koma Satu) triliun, pendapatan lain pemerintah selain dari pajak sejumlah Rp275,4 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat) triliun dan penerimaan dari hibah sejumlah Rp1,2 (Satu Koma Dua) triliun. Pencapaian target yang sudah direncanakan diharapkan dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan dalam bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih modern mengikuti perkembangan teknologi terkini dan selalu dilakukan perbaharuan, melalui penggunaan

system e-filing, e-form dan e-faktur serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (<https://kemenkeu.go.id/>, 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah perlu mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengajak masyarakat termasuk pelaku usaha untuk lebih patuh dalam membayar pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat pemerintah juga melakukan modernisasi dalam hal pelaporan dan pendaftaran pajak di Indonesia, misalnya melalui pendaftaran Wajib Pajak secara *online*, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.

Wajib pajak terkadang tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut melalui sistem elektronik administrasi pajak diantaranya adalah *e-billing, e-filing* dan *e-faktur*. Direktorat jenderal pajak meluncurkan *e-billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik. *E-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*, (N. W. Sari, 2021). Direktorat jenderal pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *e-billing*. Direktorat jenderal pajak (2017) per 1 Juli 2016 juga

mengharuskan seluruh Wajib Pajak menggunakan *e-billing* dalam pembayaran pajak. Namun sampai pada tahun 2016 hanya sebagian kecil WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang menggunakan fasilitas *e-billing* untuk membayar pajak.

E-Filing adalah *systemonline* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*" (N. W. Sari, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media komputer yang terhubung langsung ke *internet*, maka penyampaian SPT dapat dilakukan, di mana wajib pajak dapat melaporkan SPT wajib pajak badan dengan jenis Pajak PPh dan PPN dan mendapatkan *real time* *acknowledgment* (konfirmasi pelaporan pajak), yang berarti nomor konfirmasi langsung didapatkan. *E-filing* merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajak secara *real time* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dengan menggunakan jalur internet. Pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dapat membantu memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Keunggulan lain yang dimiliki *e-filing* adalah kualitas sistem dan kualitas informasi *efiling* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara cepat dan aman, (Noch & Pattiasina, 2017).

Sistem *E-faktur* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem

elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerapan sistem *e-faktur* secara bertahap, dimana mulai 1 juli 2014 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP136/PJ/2014, mulai 1 juli 2015 bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan mulai 1 Juli 2016 bagi seluruh PKP secara nasional.

Dalam menggunakan aplikasi *sistem e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan *internet*, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Namun saat ini belum banyak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan sistem *e-faktur* karena Pengusaha Kena Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan Pengusaha Kena Pajak yang belum paham tentang pengoperasian sistem *e-Faktur* dengan menggunakan Internet dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Faktur* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang sistem *e-Faktur* kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang dimoderasikan pemahaman internet.

Penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan telah dilaksanakan oleh Sarunan, (2013) dengan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan *online payment*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-registration* dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan pada KPP Manado. Namun Rahayu dan Lingga, (2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern

yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain *e-SPT*, *efiling*, dan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Marjan (2014) ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Husnurrosyidah, (2017) dengan hasil bahwa *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT se Kabupaten Kudus. Putra, dkk (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *sistem administrasi-e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Suherman dan Almunawwaroh (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pratami, dkk (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filling*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat tidak konsistennya hasil penelitian sehingga menjadi research gap dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Husnurrosyidah, 2017) dengan perbedaan bahwa pada subjek penelitian di mana pada penelitian terdahulu adalah pada BMT sedangkan penelitian sekarang fokus pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hasil berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan *e-*

faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Kota Jayapura”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?
3. Apakah penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?
4. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?
5. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?
6. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-faktur* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.
2. Menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.
3. Menguji pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.
4. Menguji pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.
5. Menguji pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura.
6. Menguji pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan sistem *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Jayapura.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan terhadap literatur maupun penelitian dibidang akuntansi, terutama pada perpajakan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan

akademi lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh penerpan sistem *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Jayapura.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya di Kota Jayapura untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* untuk wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah. selain itu, peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak atau membayar pajak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Jayapura". Peneliti melakukan studi pustaka atas penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) (Husnurrosyidah, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *E-filing*, *E-billing* Dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus". Menunjukkan hasil penelitiannya : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal Ini dibuktikan dengan nilai koefisien *direct effect* sebesar 0,762 *P-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,5 yang memiliki arah positif. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,413 *P-value* sebesar 0,07 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif. Penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,675 *P-value* sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif.
- 2) (Noch & Pattiasina, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Determinan Persepsi Kemudahan, Persepsi kebermanfaatan, Persepsi Resiko dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-filing (Survei pada

KPP Pratama Jayapura)". Menunjukkan hasil penelitian: persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama jayapura dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai thitung $2,843 >$ nilai tabel $1,666$ dan nilai signifikan $0,006 < 0,050$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noviandini, 2012), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. Penelitian ini berhasil membuktikan persepsi kebermanfaatan tidak berpengaruh terhadap Penggunaan sistem *e-filing* di kpp pratama jayapura dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai t hitung $0,779 <$ nilai t tabel $1,666$ dan nilai signifikan $0,439 > 0,050$. Penelitian ini berhasil membuktikan persepsi risiko berpengaruh terhadap Penggunaan sistem *e-filing* di kpp pratama jayapura dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai thitung $2.682 <$ nilai t tabel $1,666$ dan nilai signifikan $0,009 > 0,050$. Penelitian ini berhasil membuktikan kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem *e-filing* di KPP Pratama jayapura dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai thitung $2.739 >$ nilai t tabel $1,666$ dan nilai signifikan $0,008 > 0,050$.

- 3) PRATAMA, dkk (2019) berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar". Menunjukkan hasil penelitiannya : Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai koefisien sebesar $0,198$ dan nilai koefisien regresinya $2,320$ dan signifikan sebesar $0,022$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga H_1 diterima, yang berarti bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar. Menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* memiliki koefisien sebesar $0,205$ dan nilai koefisien regresinya $2,184$ dan signifikan sebesar $0,031$ lebih kecil

dari 0,0 sehingga H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,217 dan nilai regresinya 2,302 dan signifikan sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,284 dan nilai koefisien regresinya 2,440 dan signifikan sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

- 4) Prasetyo, n.d. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi". Menunjukkan hasil penelitiannya : Penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Nilai Koefisien regresi sebesar 0,132 yang memiliki arah positif. Pemahaman internet berpengaruh positif atau memperkuat pengaruh penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 9,005 yang lebih besar dari F tabel 3,09 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel penggunaan *e-filing* sebesar -1,591 dengan signifikan 0,008 yang memiliki arti apabila penggunaan sistem *e-filing* tak sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 1,591. Variabel pemahaman internet memberikan nilai koefisien sebesar -2,107 dengan signifikan 0,006 yang memiliki arti apabila sosial perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 2,107.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif atau memperlemah pengaruh antara penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dibuktikan dengan F hitung 7,992 yang lebih besar dari F tabel 3,09 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

- 5) (Aprianto, dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penggunaan *E-filing*, *E-billing* Dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". Menunjukkan hasil penelitiannya : Pengaruh *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta, dengan hasil perhitungan nilai t hitung 3,906 dengan p value $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 terbukti kebenarannya. Pengaruh *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta, dengan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 4,299 dengan p value $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 terbukti kebenarannya. Pengaruh *e-faktur* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta, dengan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung 5,400 dengan p value $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 terbukti kebenarannya.
- 6) Sari et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-faktur* Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi". Menunjukkan hasil penelitiannya : Pengaruh positif penerapan sistem *e-faktur* terhadap pemahaman internet secara langsung diperoleh data nilai CR sebesar 2,232 lebih besar dari pada nilai 1,96 selain itu dilihat dari nilai probabilitasnya (0,026) lebih besar daripada α (0,05). Sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pengaruh secara langsung antara variabel penerapan sistem *e-faktur* terhadap pemahaman internet. Pengaruh positif tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak terhadap pemahaman internet, dengan nilai yang diperoleh dari data CR sebesar 2,896 lebih besar dari nilai 1,96. Dilihat dari nilai probabilitasnya (0,004) lebih besar daripada α (0,05). sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 7) Azra, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Di Kota Batam". Menunjukkan hasil penelitiannya : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan persepsi kepatuhan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H1 yang diajukan dapat diterima. Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan persepsi pemahaman pendidikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H2 yang diajukan dapat diterima.

- 8) R. R. N. Sari, (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *E-filing*, *E-billing* Dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri". Menunjukkan hasil penelitiannya : Hasil perhitungan uji regresi menghasilkan nilai F hitung sebesar 28,990 dengan signifikan sebesar 0,000. Oleh karena signifikan F hitung kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka hipotesis *nol* (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, dengan demikian ada pengaruh signifikan secara simultan semua variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 9) Pratama, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang". Menunjukkan hasil penelitiannya : Penelitian mengenai hasil uji T menyatakan bahwa nilai signifikan variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa signifikan $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima artinya terdapat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menguji T menyatakan bahwa nilai signifikan variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa signifikan $0,005 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima artinya pemahaman internet memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 10) Manullang, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali". Menunjukkan hasil penelitiannya : Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,292 dan hasil uji *T* secara parsial menunjukkan nilai signifikan variabel penerapan sistem *e-filing* diperoleh hasil *T* hitung lebih besar dari *T* tabel ($9,120 > 1,966$) dengan signifikan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,229 dan hasil uji *T* secara parsial menunjukkan nilai signifikan variabel penerapan sistem *e-billing* diperoleh hasil *t* hitung lebih besar dari *T* tabel ($7,978 > 1,966$) dengan signifikan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, berdasarkan hasil regresi bahwa koefisien *moderate regression* sebesar 0,138 dan dengan signifikan sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima dan dapat disimpulkan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, berdasarkan hasil regresi bahwa koefisien *moderate regression* sebesar 0,335 dengan signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05. Sehingga H4 diterima dan disimpulkan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- 11) (Fadilah, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing*, *E-filing* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Menunjukkan hasil penelitiannya : Hasil pengujian yang

didapat nilai signifikan sebesar 0,933 dimana $0,933 > 0,05$ sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil pengujian yang didapat nilai signifikan sebesar 0,005 dimana nilai $0,005 < 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil pengujian yang didapat nilai signifikan sebesar 0,058 dimana $0,058 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

- 12) (Nense Wulan Sari, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-biling, dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Menunjukkan hasil penelitiannya : Penerapan *E-billing* memiliki nilai t hitung sebesar 2,460 dengan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 ($0,014 < 0,05$), karena nilai t hitung lebih besar dari nilai ttabel ($2,460 > 1,968$) maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Penerapan *E-billing* berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan *E-filing* memiliki nilai t hitung sebesar 1,881 dengan nilai signifikansi 0,061 lebih besar dari 0,05 ($0,061 > 0,05$), karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,881 < 1,968$) maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel Penerapan *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2.1

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
1	Husnuhrrosyidah, Suhadi (2017)	Pengaruh E-filing, E-billing Dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus	a. E-filing (X1) b. E-billing (X2) c. E-faktur (X3) d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Analisis Regresi Berganda	penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penerapan sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Muhammad Yamin Noch, Victor Pattiasina (2017)	Determinan Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan	a. Persepsi Kemudahan (X1) b. Persepsi Kebermanfaatan (X2) c. Persepsi Resiko (X3) d. Kepuasan Wajib Pajak (X4) e. Sistem <i>E-filing</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda	Persepsi kemudahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i> . Persepsi kebermanfaatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i> .

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
					Persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i> . Kepuasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem <i>e-filing</i> .
3	I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I Made Sudiartana (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar	a. Penerapan e-filing (X1) b. E-billing (X2) c. Kepatuhan wajib pajak (Y1) d. Pemahaman internet (Z)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
					sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Andreas Prasetyo, Farida Idayati (2019)	Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	a. E-filing (X1) b. Kepatuhan wajib pajak (Y1) c. Pemahaman internet (Z1) d. Sosialisasi perpajakan (Z2)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet berpengaruh positif atau memperkuat pengaruh penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif atau memperlemah pengaruh antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Julang Aprianto, Fajar Harimurti, Bambang Widarno (2019)	Pengaruh Penggunaan E-filing, E-billing Dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	a. E-filing (X1) b. E-billing (X2) c. E-faktur (X3) d. Kepatuhan wajib pajak badan	Analisis Regresi Berganda	E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
					E-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Siska Permata Sari, M. Orba Kurniawan, Muhammad Fahmi (2019)	Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	a. Penerapan e-faktur (X1) b. Tingkat kepatuhan PKP (Y1) c. Pemahaman internet (Z)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan sistem e-faktur berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat)

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
					hubungan antara penerapan sistem e-faktur terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
7	Lia Novita Azra, Handra Tipa (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam	a. Penerapan sistem e-filing (X1) b. Penerapan sistem e-billing (X2) c. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan sistem e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam. Penerapan sistem e-billing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam
8	Rini Ratna Nafita Sari (2019)	Pengaruh E-filing, E-billing Dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri	a. E-filing (X1) b. E-billing (X2) c. E-faktur (X3) d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
					Penerapan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Iva Yuliana Pratama, Nur Diana, M. Cholil Mawardi (2020)	Pengaruh Penerapan Sisten E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang	a. Penerapan e-filing (X1) b. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y1) c. Pemahaman internet (Z)	Analisi Regresi Berganda	Penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
10	Gilbert Dwi Reinaldo Manulang, Putu	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing	a. Penerapan e-filing (X1) b. E-billing (X2)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan e-filing berpengaruh

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
	Eka Dianita Marvilianti Dewi, I Nyoman Putra Yasa (2020)	Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali	c. Kepatuhan wajib pajak (Y1) d. Pemahaman internet (Z)		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi bahwa pemahaman internet dapat memperkuat penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Khusnul Fadila, Sapari (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-billing, E-filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap	a. Penerapan e-Billing (X1) b. E-filing (X2) c. Sanksi perpajakan (X3)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak	d. Kepatuhan wajib pajak (Y1)		Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Nense Wulan Sari (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-billing</i> Dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)	a. <i>E-billing</i> (X1) b. <i>E-filing</i> (X2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Analisis Regresi Berganda	Penerapan <i>E-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Kajian Teori

A. Landasan Teori

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seorang individu. Menurut PRATAMA, (2019) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu sendiri. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Technology Acceptance Model (TAM)

Merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM merupakan penyesuaian dari TRA yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Sedangkan menurut PRATAMA, (2019) TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Tujuan TAM lebih dikhususkan untuk menjelaskan perilaku para pengguna komputer

(*computer usage behavior*). Terdapat 5 konstruk dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis et. al, (1986) yaitu :

1. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat memudahkan suatu tugas.
2. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*).
4. Minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*).
5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology usage*).

Dari 5 konstruk tersebut persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan merupakan salah satu penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* dan *e-billing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Perpajakan

Perpajakan adalah kontribusi wajib yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat (wajib pajak), yang terutang dan dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan berguna untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia Nense Wulan Sari, (2021). Pajak menurut Soemitro, (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membangun bangsa secara luas dan membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya di Indonesia.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan *subjektif* dan *objektif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *SelfAssessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Nense Wulan Sari, (2021) yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) adalah pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah guna membiayai pengeluaran pemerintah;
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulaerend*) alat guna mengatur dan melaksanakan perekonomian dan kebutuhan sosial negara;

- 3) Fungsi pemerataan (*Redistribution*) yang artinya pajak berfungsi sebagai pemerataan yang harus bersifat adil kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- 4) Fungsi stabilisasi (*Stabilisation*) yaitu pajak berfungsi untuk menstabilkan harga serta laju inflasi negara.

Sistem Pemungutan

Pajak Di Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak Mardiasmo, (2016). Sistem tersebut terdiri dari: (1) *Official Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan tarif besarnya pajak terutang wajib pajak adalah pemerintah sendiri. Ciri – ciri dari *Official assesment system* adalah fiskus diberi wewenang guna menentukan besarnya pajak terutang, para wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul ketika diterbitkannya surat ketetapan oleh fiskus; (2) *Self assesment system* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri dari *self assesment system* adalah wajib pajak menentukan sendiri besar pajak yang terutang, wajib pajak melakukan aktivitas menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus hanya mengawasi dan tidak perlu ikut campur; (3) *With holding system* adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak, dan bukan fiskus) dan diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang pada wajib pajak. Ciri – ciri dari *with holding system* adalah wewenang tersebut diberikan penuh kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang wajib pajak.

Sistem E-billing

E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran

menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *E-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik.

Adapun mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing*:

A. Memulai layanan *e-billing* DJP

- 1) Cara registrasi menjadi peserta Billing
 - a. Buka situs *Billing System* melalui internet <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN)
 - b. Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan *User ID* yang diinginkan. Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui e-mail yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada e-mail tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta link aktivasi.
 - c. Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.
- 2) Cara pembuatan Kode *Billing* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau Internet Banking. Berikut tahapan cara untuk mendapatkan kode *Billing*:
 - a. Akses situs *Billing System* dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>.
 - b. Masukkan *User ID* dan *PIN* untuk melakukan login.
 - c. *Field* NPWP, nama, alamat dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data dan tidak bisa diubah.
 - d. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *dropdownbox*.

- Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silakan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-downbox*.
 - Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak hak akan tanah dan/atau penagihan bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
 - Pilih masa pajak dengan memilih dua bulan yang tersedia pada *drop-downbox*.
 - Pastikan anda telah memilih kedua *box*, misalnya januaris.d. januari.
 - Tahun pajak.
 - Nilai rupiah pembayaran, dan
 - Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada), kemudian simpan
- e. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode Billing” untuk menerbitkan kode *Billing*.
- f. Setelah sistem menerbitkan kode *Billing*, dapat mencetaknya sebagai refrensi pembayaran di loket bank, atm, maupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus dapat anda lakukan melalui menu “View Data”.

B. Keuntungan E-billing

Menurut situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) terdapat lima keuntungan jika menggunakan fasilitas sistem *e-billing*, yaitu:

1. Terintegrasi

E-billing online pajak terintegrasi dengan Bank persepsi serta aplikasi hitung PPh, PPN, *e-Faktur*, dan *e-Filing* di satu aplikasi. Sehingga tidak perlu memasukan datayang sama berulang kali yang merepotkan dan menyita waktu dan pembayaran pajak lebih efisien dan mudah.

2. Akurat

E-billing online pajak dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual. Karena pengisian KAP (Kode Akun

Pajak) dan KJS (Kode Jenis Setoran) secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi pada aplikasi PPh Pasal 21, PPh Final 1% dan PPN online pajak.

3. Transaksi Real-time

Setelah melakukan pembayaran online dengan *Pajak Pay*, data transaksi langsung terekam di situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan kas negara, bukti pembayaran negara beserta nomor transaksi penerimaan negara yang diterima sah dari negara karena online pajak bekerja sama dengan Bank persepsi.

Penerapan E-filing

Melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi sistem *e-filing* diluncurkan. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui penyedia Jasa Aplikasi 9ASP). Secara garis besar *e-filing* adalah suatu media untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang dilakukan secara online. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa keuntungan apabila menggunakan fasilitas *e-filing* diantaranya Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7), Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Untuk dapat melakukan *e-Filing*, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi: (1) Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-Filing*. Karena hanya sekali digunakan, Anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut, (2) Mendaftarkan diri sebagai WP *e-Filing* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*, (3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara *e-Filing* melalui situs DJP.

Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi(ASP) yaitu:

- 1) Berbentuk badan. Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.
- 2) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *real time*.
- 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah:

- a) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (*via internet*) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau

tempat nya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

- b) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- c) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

Tujuan penerapan *e-filing* berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. 1.

- a) Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b) Wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
- c) *E-filing* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jendral Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

E-faktur

E-faktur (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan *e-faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,

kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak. Pemberlakuan *e-faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-faktur* per 1 juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-faktur* secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib *e-faktur*, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016).

Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. (Putri. 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal, dan Kathryn (2012) menunjukkan bahwa modernisasi *e-nofa* pajak pertambahan nilai berpengaruh 31,3% terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan nomor faktur. Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan *e-faktur* merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi pajak. Wajib pajak yang memiliki *e-faktur* akan memiliki *e-nomor faktur*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, n.d.) tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Febriana, (2019) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, yang mana dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun pendapat lain menurut (Febriana, 2019) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak dan

perpajakannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Febriana, (2019 mengemukakan beberapa kewajiban seorang wajib pajak diantaranya :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri Perpajakan Indonesia menganut *sistem self assessment*, oleh karena itu, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal wajib pajak. Tujuan mendaftarkan diri ini adalah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas perpajakan.
- b. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak Indonesia menggunakan sistem *selfassesment*, wajib pajak harus melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
- c. Kewajiban dalam hal pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

A. Jenis Wajib Pajak Jenis-jenis wajib pajak terdiri dari:

- Wajib Pajak Orang Pribadi:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
- Wajib Pajak Badan :

1. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD).
2. Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan).
- Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :
 1. Bendahara Pemerintah Pusat.
 2. Bendahara Pemerintah Daerah.
 3. Bendahara Pemerintah Desa (Bendahara Desa).
 4. Badan Layanan Umum (BLU).
 5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Berdasarkan tempat terdaftarnya, Wajib Pajak terdiri dari :
 1. Wajib Pajak Domisili atau Tunggal.
 2. Wajib Pajak Pusat.
 3. Wajib Pajak Cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu.

Pemahaman Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal). Pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami dengan suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami suatu hal tersebut secara mudah dan tepat. Febriana, (2019) mengemukakan bahwa internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan yang menggunakan standar Internet *Protocol Suite* (*TCP/IP*) untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Internet membawa berbagai macam sumber informasi dan layanan, seperti antar-*linkedhypertext* dokumen dari *WordWide Web* (WWW) dan Infrastruktur untuk mendukung surat elektronik.

Menurut Prasetyo, (2019) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Hermawan, (2013) Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan

komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat. Sehingga dapat mencari informasi yang sesuai dan akurat dari internet. Selain itu dapat juga memberikan kemudahan dalam memahami ataupun belajar tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut S. P. Sari et al., (2019) mendefinisikan internet adalah sebuah jaringan komputer global. Internet tersusun atas ribuan jaringan komputer dari berbagai belahan dunia yang saling terhubung, internet dapat diartikan sebagai induk dari jaringan komputer. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan data *base* informasi.

Menurut Pratama, dkk (2020), internet merupakan jaringan komputer yang berkembang dengan pesat dalam mencukupi kepentingan bisnis, pendidikan, dan pemerintah yang menghubungkan jutaan komputer dan pemakainya di dunia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa internet merupakan jaringan secara global yang menghubungkan semua komputer yang digunakan untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, pemerintah maupun pribadi.

Internet selain digunakan untuk tujuan militer juga dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam kegiatan sehari - hari, antara lain mendapatkan informasi tentang tata cara menggunakan dan pertumbuhan sistem *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur*, menambah pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan yang berguna bagi wajib pajak dan internet memberikan akses yang cepat bagi Wajib Pajak dalam mengakses penyampaian *e-billing*, *e-filing* dan *e-faktur*.

B. Kerangka Konseptual

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Penerimaan pajak dapat meningkatkan pembangunan menyeluruh di seluruh

wilayah Indonesia. Oleh sebab itu maka pajak dianggap sebagai sumber penerimaan yang paling potensial bagi negara. Sebagai sumber potensial pajak harus dipastikan pemungutannya agar semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak oleh negara tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang patuh akan melaporkan SPT nya setiap tahunnya ke kantor pajak. Kepatuhan ini akan berdampak positif bagi kemakmuran rakyat.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan perpajakan adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada tingkat sanksi perpajakan yang diterapkan. Adanya sanksi yang mengikat akan membuat wajib pajak merasa takut dirugikan sehingga mau tidak mau wajib pajak akan membayar pajak. Kerangka konseptual merupakan gambaran dari pola hubungan antara variabel-variabel penelitian yang hendak diuji. Dengan kerangka konseptual, akan dapat diketahui kajian teori dasar yang dibutuhkan, metode pemecahan masalah, dan prediksi atas hasil pengujian yang akan dilakukan. Maka kerangka serta variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Kerangka Berpikir

**Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, E-billing dan E-faktur Kepatuhan
Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada
KPP Pratama Kota Jayapura**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Menurut Nana Sudjana, hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah, (2017) menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Penerapan *E-billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Jayapura

Penelitian yang dilakukan oleh PRATAMA, (2019) menemukan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Penerapan *E-filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Jayapura

Penelitian yang dilakukan oleh (N. W. Sari, 2021) menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Penerapan E-faktur Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Jayapura

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, n.d. (2019) menemukan bahwa Pemahaman internet berpengaruh positif atau memperkuat pengaruh penggunaan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₄ : Pemahaman Internet berpengaruh positif atau memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Jayapura

Penelitian yang dilakukan oleh PRATAMA, (2019) menemukan bahwa Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₅ : Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) Pengaruh Penerapan Sistem E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Jayapura

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha et al., 2020) menemukan bahwa Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₆ : Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara Penerapan Sistem E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Jayapura.

Penelitian yang dilakukan oleh S. P. Sari et al., (2019) menemukan bahwa Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survai. Menurut Nurhidayah, (2015) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Menurut (Febriana, 2019) populasi mengacu pada serangkaian objek yang komprehensif yang menjadi perhatian peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Kayati, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jayapura.

Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode insidental sampling. Menurut (Fadilah, 2020) insidental sampling adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Besarnya sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* (Sanusi, 2016), yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+NC^2} \dots\dots\dots (1) \\n &= \frac{163.886}{1 + 163.886 (0,10)^2} \\n &= \frac{163.886}{1639,86} \\n &= 99,9 \quad \quad \quad (\text{Dibulatkan Menjadi } 100)\end{aligned}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurhidayah, (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Marliana et al., 2015). Di jelaskan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2014 bahwa pembayaran pajak secara elektronik yang

dikenal dengan *e-filling*, *e-billing* dan *e-faktur* yang telah diuji tahun 2011. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Penerapan Sistem *E-filing*, *E-billing* dan *E-faktur*.

E-Filling merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang realtime dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet.

E-billing adalah sebuah system yang memiliki kode pembayaran untuk melakukan penyetoran pajak secara elektronik, sehingga wajib pajak tidak harus membuat Surat Setoran manual. *E-billing* adalah reformasi administrasi perpajakan agar memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak secara online ke dikjen pajak.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

3. Variabel Pemoderasi

Variabel pemoderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel pemoderasi adalah Pemahaman Internet. Pemahaman Internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Internet memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi.

b. Menambah pengetahuan.

c. Kecepatan mengakses.

Ketiga manfaat tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Pemahaman Internet. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Jayapura yang bergerak dibidang pelayanan pajak dan berlokasi di jalan Otonom No.3, Wahno, Abepura, Kota Jayapura.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* yang terdaftar di KPP Pratama Kota Jayapura. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

2. Dokumentasi

Menurut Noviani, (2018) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya harian, sejarah kehidupans (*lifehistories*), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup. Sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

1. Uji Instrumen

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali, (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat output *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,30 dengan kriteria pengujian apabila nilai *pearsoncorrelation* $< 0,30$ maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan bila nilai *pearsoncorrelation* $> 0,30$ maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, (2018) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variakonstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran oneshot atau pengukuran sekali saja, pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antarjawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan

semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap butir pertanyaan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Uji

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variable pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S > 0.05$, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 5\%$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* > 0,10 atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* sedangkan jika varian dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut *Heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas*. Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak

terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5%

3. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji interaksi yang sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Teknik analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti *variable* independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan variabel moderator.

Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut (Ghozali, 2018)

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z_i + \beta_5 X_i * \beta_6 X_2 * Z_i + \epsilon \dots\dots\dots 2)$$

Keterangan :

Y_i = kepatuhan Wajib Pajak

α = bilangan konstanta

β = koefisien arah persamaan penelitian

X_1 = penerapan sistem *e-filing*

X_2 = penerapan sistem *e-billing*

X_3 = Penerapan sistem *E-faktur*

Z = jenis variabel moderator

ϵ = kesalahan pengganggu $Y_i \alpha$

4. Menilai *Goodness of Fit* Suatu Model

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 , mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X . Jika nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, namun jika R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 untuk data *crosssectional* relatif rendah (Ghozali, 2018)

b. Uji Statistik Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F diketahui dari tabel analisis varian (ANOVA). Untuk mengetahui hasil uji F , hasil regresi akan dibandingkan dengan nilai tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Jika signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka model penelitian F dengan data

c. Uji Statistik t (Uji Regresi secara Parsial)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t -test. "Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen". Uji ini dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 (N. W. Sari, 2021) H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $\text{Sig } t \leq \alpha = 0.05$.

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $\text{Sig } t > \alpha = 0,05$

Kesimpulannya, jika H_0 diterima berarti masing-masing variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika H_0 ditolak berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur *boots trapping* dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Kemudian untuk melihat ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis menggunakan perbandingan nilai *T-table* dan *T-statistics*. Jika nilai *T-statistics* lebih tinggi dibandingkan nilai *T-table*, maka hipotesis terdukung. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan $\alpha = 5\%$ adalah kurang dari 0,1. Nilai *t-tabel* untuk $\alpha = 5\%$ adalah 1,96 (Putri Sekti Ari, 2019)

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut (Agustiningsih & Isroah, 2016) dalam.

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = harga $\hat{Y}$ ketika harga $X = 0$ (harga konstan)

b = angka arah atau koefien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Aprianto, julang; Harimurti, Fajar; Widarno, B. (2019). *Pengaruh Penggunaan e-filing, e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan*.
- Azra, Novita, Sari;Tipa, H. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam*.
- Fadilah, K. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, E-billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Febriana, A. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilbert Dwi Reinaldo Manullang, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, I. N. P. Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sisem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Inernet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 169–180.
- <https://kemenkeu.go.id/>. (2018). *RAPBN 2018*.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, A. Y., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasipada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Kayati. (2016). *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Aakuntansi Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*.

- Marliana, R., Almunawwaroh, M., & Suherman, M. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*.
- Noch, M. Y., & Pattiasina, V. (2017). *Persepsi Risiko Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-filing (Survei Pada KPP Pratama Jayapura) Pajak Terhadap Penggunaan Sistem E-filing*. November.
- Noviandini, N. C. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i1.988>
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Nugraha, I. D. G. S., Sastri, I. D. A. . M., & Miati, N. L. P. M. (2020). Pemahaman Iinternet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1762.1-10>
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*.
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Rumasukun, M. R., Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2020). *Determinants of Taxpayer Compliance Level : Empirical Study in East Indonesia*. 51(March), 339–351. <https://doi.org/10.36872/LEPI/V51I1/301030>
- Prasetyo, A. (n.d.). *Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemoderasi*.
- Pratama, Yuliana, Iva;Diana, Nur; Mawardi, C. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kota Malang*.
- Putri Sekti Ari, D. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory Of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Profit*. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit).

- Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170.
- Sari, S. P., Kurniawan, M. O., & Fahmi, M. (2019). Pengaruh penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan pkp dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*. ISSN 2662-9404.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodologi Penelitian.). In *Metodelogi Penelitian*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.). *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*.

LAMPIRAN KUESIONER

Assalamu'alaikumwr. wb.

Saya Sri Rahayu mahasiswa/i akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Yapis Papua Jayapura angkatan 2018, memohon kerja sama Bapak/ Ibu/ Saudara/I untuk mengisi kuesioner penelitian mengenai "Pengaruh Penerapan *E-billing*, *E-filing* Dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Kota Jayapura". Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, saya harapkan Wajib Pajak yang menjadi responden menjawab kuesioner dengan akurat dan berdasarkan pengalaman, dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap informasi yang didapatkan dari kuesioner ini murni hanya untuk tujuan akademis dan tidak berpengaruh apapun terhadap responden.

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda (✓) pada kolom Pilihan Jawaban. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

No.	Uraian		Skor
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat berarti untuk penelitian saya. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Bagian I : Identitas Responden

Nama*) : _____

Usia : ☐ <30 Tahun ☐ 30-50 Tahun ☐ >50 Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita

Pekerjaan : ☐ TNI/POLRI ☐ PNS ☐ Wiraswasta
☐ Karyawan Swasta ☐ Lainnya _____

Pendidikan : ☐ SLTA ☐ D1 ☐ D3
☐ S1/D4 ☐ S2 ☐ Lainnya _____

Bagian II : Sistem E-billing

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penoperasian <i>e-billing</i> mudah untuk dimengerti					
2.	Dengan diterapkannya <i>e-billing</i> memudahkan wajib pajak untuk menghitung pajak terutang dengan benar.					
3.	Dengan diterapkannya <i>e-billing</i> wajib pajak membayar pajak terutang dengan tepat waktu.					
4.	Saya mengisi formulir / persyaratan <i>e-billing</i> dengan lengkap dan jelas.					
5.	Sistem <i>e-billing</i> pernah/sering bermasalah saat digunakan					

6.	Saya memahami perundang-undangan terutang pajak atau <i>e-billing</i>					
----	---	--	--	--	--	--

Bagian III : Penerapan Sistem *E-filing*

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.					
2.	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya					
4.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.					
5.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak.					
6.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
7.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
8.	Sistem <i>e-filing</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna					

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
	yang belum pernah menggunakan <i>e-filing</i>).					
9.	Sistem <i>e-filing</i> dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT.					
10.	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap.					

Bagian IV : Sistem E-faktur

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Dengan adanya e-faktur menghindari faktur pajak fiktif.					
2.	E-faktur memberikan kemudahan dan keamanan terhadap wajib pajak					
3.	E-faktur meningkatkan kepercayaan terhadap petugas pajak					
4.	E-faktur meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.					
5.	Secara keseluruhan e-faktur bermanfaat bagi saya.					

Bagian V : Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan membuat NPWP					
2.	Saya selalu mencantumkan nilai yang benar dalam SPT					

3.	Saya bersedia memenuhi kewajiban pajak yang terhutang					
4.	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu					
5.	Saya tidak pernah mendapat sanksi akibat kelalaian di bidang perpajakan					

Bagian VI : Pemahaman Internet

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i> .					
2.	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i>					
3.	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.					
4.	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak					
5.	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya.					

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
6.	Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-faktur</i>					